**TINJAUAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI KAMPUNG DEMPAR KECAMATAN NYUATAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AGZELIN SUCITA**

**16.11.1001.3509.098**

H. Ahmad Jubaidi S.sos,M.si dan Drs. H. Maskan AF. M.si

Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

**ABSTRAK**

Agzelin Sucita NPM : 16.11.1001.3509.098, Program studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, “ *Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat’’.* Di bawah bimbingan H. Ahmad Jubaidi , S.sos, M.Si dan Bapak Drs. Maskan AF. M.Si.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam mendukung pembangun desanya, baik dalam partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang dan partisipasi uang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, jenis penelitian atau penjelasan yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif digunakan Mendiskripsikan variable penelitian. Jenis data yang digunakan, wawancara observasi, dan dokumentasi.

Dengan dilaksanakannya penelitian di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Barat diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar konsep pembangunan partisipatif yang telah diterapkan dapat ditakar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan substansi pembahasan.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat digambarkan bahwa penerapan pembangunan partisipatif di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat . jika merajuk pada hasil musrenbang yang telah tercatat pada BAPPEDA Kabupaten Kutai Barat, maka hasil yang didapatkan adalah meski dalam tahap perencanaan masyarakat tetap berpartisipasi, tetapi pada tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat yang diharapkan ada tetapi hanya sedikit masyarakat ang mau ikut berpartisipasi, oleh karena pada tahap pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh kontraktor pemenang tender. Namun, jika merajuk pada proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh program pemberdayaan yang berjalan di Kampung Dempar, utamanya yang didanai dari dana alokasi desa, dalam penelitian ditemukan bahwa antusiasme masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan yang dilaksanakan mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi proyeknya sangat tinggi. Hal ini dapat disimpulkan dalam tahap pelaksanaan masih banyak hal yang mesti dibenahi.

**Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Kampung Dempar**

1. **PENDAHULUAN**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam melaksanakan pembangunan didaerah tersebut. Dengan menggunakan perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penting dalam perencanaan pembangunan adalah keberanian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian kapan melakukannya, selanjutnya bagaimana melakukan dan yang terakhir siapa yang melakukannya. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang H.Rudianto (2009:5),Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah,suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*Economic entity)* yang didalam nya terdapat berbagai unsur yang berintraksi satu sama lain.

Pembangunan pedesaan pun harus dilakukan agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam pembangunan pedesaan harus ada kerangka yang jelas apa yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu serta adanya kesamaan gerak dan langkah pembangunan perkotaan dan pedesaan Hasbiah (2018:8). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemperdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiasfek, oleh karna itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar pedesaan, sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional. Harapan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan dalam rangka perubahan kondisi masyarakat dari satu realita ke realita yang secara keseluruhan lebih baik, akan tercapai melalui konsep yang lebih baik mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sebagai manan filsafah yang terkandung di dalam otonomi daerah tersebut, yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelsaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparasi, kesetaraan dan tanggung jawab. Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas istilah yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif. Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi.

Menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada era 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Presiden soeharto sejak tahun 1966 menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan sesuai dengan paradigma pemerintahan orde baru yang sentralistik, seluruh kebijakan pembangunan dilakukan secara “top-down” inisiatif dalam menetapkan kebijakan pembangunan berasal dari atas (pejabat berwenang) tanpa melibatkan dan stakeholder lainnya.

Dalam kaitan dengan ini, masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam membantu dana maupun tenaga. Pada saat itu partisipasi dipandang sebagai proses mobilisasi yaitu penggerakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Meskipun model ini memiliki keunggulan karena pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara cepat, namun kelemahan yang dijumpai adalah masyarakat yang sering merasa tidak memiliki tanggung jawab dan manfaat dari kegiatan pembangunan tersebut.

Keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional.ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalaman menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karna masyarakat lokallah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan to down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal. daripada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarah sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Hasil penelitian W. Boyers, Hasbiah (2018:4) menyimpulkan bahwa legistimasi dan keberhasilan dari suatu program pembangunan dalam skala nasional bagi suatu negara berkembang, program yang dilakukan dengan memperhatikan situasi dilaksanakan dari bawah ke atas *(bottom-up)* dan program tersebut sesuai bagi rakyat, ketimbang dilakukan secara seragam *(top-down)* dengan program yang didominasi oleh pemerintah pusat.

(a) Keterlibatan masyarakat dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan, (b) Ikut serta dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup.

Disisi lain jika kita melihat kebelakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (*BottomUp)* ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa. Begitupun dalam halnya melaksanakan proyek yang masih menggunakan sistem tender, dimana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berda didesa. hal tersebut menunjukan bahwa ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses Musrembang akan tetapi bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagimana proses keterlibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Karna antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi dari proses pembangunan itu telah tercipta Hasbiah (2018:8).

Proses identifikasi masalah yang dibahas dalam pembahasan saat ini yaitu Kurangnya rasa tanggung jawab, semangat gotong-royong dan kususnya dalam bentuk partisipasi tenaga, dalam bidang pembangunan Kampung. Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dengan judul:**’’Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat”.**

**1.2. Rumusan Penelitian**

Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah jalan penelitian tersebut. Arikunto (2002:17) menguraikan agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya, sehingga jelas darimana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupeten Kutai Barat

**BAB II**

**KERANGKA DASAR TEORI**

**2.1. Teori dan Konsep**

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah, maka perlu adanya pedoman toritis yang dapat membantu. Landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya coba-coba (*trial and error),*Sugiono (2004:55).

Menurut Hoy & Miskel (dalam Sugiono, 2004:55) teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan prilaku dalam berbagai organisasi. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyuusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Sehubungan dengan itu, maka berikut akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi konsep kebijakan.

**2.1.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutif oleh R.A. Santoso Sastropoetro (2001:13) sebagi berikut “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas,maka partisipasi itu tidak berdasarkan pada keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Sejalan dengan pendapat diatas, Gordon W. Allpot (Santoso Sastropoetro, 2001:12) menyatakan bahwa: “Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/ego yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berartiketerlibatan pikiran dan perasaan”

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu :

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan,lebih dari semata-mata atau hanya terlibat secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut didalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang, dalam realitasnya terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsan dan bernegara istilah partisipasi ini sering dikaitka\n dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapa t yang dikemukakan oleh santoso S. Hamidjoyo (2006:67) bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.
2. Menerima kembali hasil pembangunan dan tanggung jawab terhadapnya
3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan oto aktivitas.

Dari ketiga hal tersebut di atas, jelas bahwa masalah partisipasi ini sangat urgen, lebih-lebih dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu partisipasi aktif segenap lapisan dalam membangun harus semakin luas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun didalam menerima hasil pembangunan.

Dari beberapa kajian literature tentang partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang menunjukan bahwa konsep partisipasi diinterpretasikan secara luas. Oakley (2001:1) mengartikan partisipasi kedalah tiga bentuk yaitu :

1. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interprensi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihat sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan .
2. Partisipasi sebagi organisasi, meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang diantara para praktisi dan teoritisi mengenai organisasi sebagai instumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk organisasional sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi yang bias dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi, selanjutnya dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dapat melakukanya melalui beberapa dimensi , yaitu :
3. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
4. Sumbangan materi (dana,barang,alat)
5. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
6. Memanfaatkan/melaksanakan pelayanan pembangunan
7. Partisipasi sebagai pemberdayaan, partisipasi merupakan latihan Pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit di definisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan ketrampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

Menurut Soetrisno (2000:221) bahwa secara umum, ada dua jenis definisi yang beredar di masyarakat, yaitu :

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadapa rencana/proyek yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana.ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi inipun diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang meupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.
2. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencanaan dan rakyat dalam merencanakan,melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun diwilayahnya. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Definisi mana yang dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan system pembangunan wilayah yang partisipatif. Dalam sosiologi definisi pertama merupakan suatu bentuk lain dari mobilitas rakyat dalam pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Adi (2001:208) partisipasi masyarakat atau ketertiban warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap yaitu :

1. ***Tahap Assesment***

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

1. ***Tahap Alternatif Program atau Kegiatan***

Dilakuakan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternative program.

1. ***Tahap Pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan***

Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam melaksanakannya dilapangan.

1. ***Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil)***

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.

Dengan beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksud oleh peneliti, yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana dalam hal ini masyarakan berpungsi sebagai subjek sekaligus sebagi objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi daerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

* + 1. **Unsur-Unsur Partisipasi**

Menurut Keith Davis (Sastropoetro, 2001:14) didalam pengertian partisipasi ini terhadap tiga buah unsur yang penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu :

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab

Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut keterlibatan diri/ego, sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar dan penuh terhadap kelompok.

* + 1. **Bentuk Dan Jenis Partisipasi Masyarakat**

1. **Bentuk-bentuk Partisipasi**

Selanjutnya Keith Davis (Sastropoetro, 2001:55) mengemukakan pula tentang bentuk partisipasi yaitu :

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang ada diluar lingkungan tertentu (darmawan atau pihak ketiga) dan itu merupakan salah satu partisipasi dan langsung akan langsung dirasakan masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa itu sendiri.
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh komuniti (biasanya oleh komuniti dalam rapat desa yang menentukan anggarannya).
5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tahap ahl setempat, bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat akan memperingankan pembangunan yang diselenggarakan didesa tersebut.
6. Aksi masa.
7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.
8. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.

Dalam hal partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa, Ndraha,Hasbiah (2018:15) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi yaitu sebagi berikut:

1. Partisipasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah desa, sepeti jasa/tenaga, barang maupun uang.
2. Partisipasi dalam penerimaan/pemberian informasi.
3. Partisipasi dalam bentuk pemberian gagasan.
4. Partisipasi dalam bentuk nilai pembangunan.
5. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan oprasional pembangunana

Dalam uraian diatas jelaslah kiranya bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat luas bahkan dalam hal perumusan, perencanaan,pengawasan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunanpun perlu dilibatkan.

Pembangunan yang dilakukan dipedesaan harus terpadu dengan pengembangan swadaya gotong royong. Terpadu disini dimaksud keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat, antara sector yang mempunyai program pedesaan dan antara anggota masyarakat sendiri, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Darjono (Sastropoetro,2001:19) bahwa :

“partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk swadaya gotong royong merupakan modal utama dan potensi yang essensial dalam melaksanakan pembangunan desa yang selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi dasar kelangsungan pembangunan nasional.”

Mengingat partisipasi masyarakat merupakan usaha yang membentuk kelompok yang memiliki kemampuan mentransformasikan suatu kelompok yang dinamis yang menjadi motor penggerak setiap perubahan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Weber (Abdullah, 2002:18) bahwa : “Betapa kelompok Masyarakat dapat menjadi suatu kekuatan yang dasyat didalam menggerakan berbagai berbagai perubahan ke arah kemajuan. Masyarakat dengan ciri-ciri khusus seperti kelompok yang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap peran aktif individu di dalam kehidupan bernilai tinggi merupakan kekutan perubahan yang dapat merubah tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik”.

Oleh karna itu, peran masyarakat dalam pembangunan sangatlah besar. Agar perannya efektif perlu diwadahi melalui lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Cara mengefektifkan partisipasi masyarakat utamanya pada masyarakat lapisan bahwa menurut Sastropoetro (2001:23) adalah sebagai berikut:

1. Inventarisir semua jenis kader yang ada di desa/kelurahan, guna mengetahui kemampuan tenanga yang dimiliki.
2. Inventarisir kegitan dan tujuan program masing-masing kader. Setelah terhimpun data kegiatan dan tujuan program dari masing-masing kader,data diolah dan disimpulkan untuk memperoleh rencana lokasi kegiatan, program kegiatan serta jangkauan keberhasilan.
3. Rencana kegiatan pelaksanaan program agar dicek pada mekanisme penyususnan dan pelaksanaan kegiatan program pembangunan telah masuk dalam rencana keputusan desa.
4. Tindak selanjut hasil program kegiatan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah dengan motor penggeraknya adalah kader, memerlukan pembinaan yang berkesinambungan.

Dengan demikian sumber daya manusia merupakan factor yang sangat penting sekali dalam usaha mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik maupun nonfisik. Disamping itu untuk mensukseskan pembangunan, proses penyusunan dan pelaksanaan harus direncanakan dengan matang, dengan melibatkan komponen masyarakat, sehingga tujuan pembangunan akan tercapai.

1. **Jenis-jenis Partisipasi**

Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (2001:16) mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. **Pikiran *(Psychological Participation)***
2. **Tenaga *(Physical Participation)***
3. **Keahlian (*Participation with skill)***
4. **Barang (*Material participation)***
5. **Uang (*Money participation)***
   * 1. **Prasyarat Partisipasi**

Menurut Davis dan Sastropoetro, Hasbiah (2018:20) prasyarat untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut :

1. Adanya waktu.
2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perangsang secara terbatas.
3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatian.
4. Partisipasi harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam arti kata yang bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman yang sepadan.
5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik.
6. Bebas melaksanakan peran serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Adanya kebebasan dalam kelompok, tidak adanya pelaksanaan atau penekanan.

Selanjutnya Hamidjojo dan Iskandar (dalam Sastropoetro 2001:29) menegemukakan sebagai berikut :

1. Senasib dan sepenanggungan.
2. Keterlibatan terhadap tujuan hidup.
3. Kemahiran untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan.
4. Adanya prakarsawan.
5. Iklim partisipasi.
6. Adanya pembangunan itu sendiri.

Dari kedua rumusan diatas pada dasarnya didalam berpartisipasi, partisipasi hendaknya mempunyai suatu kemampuan yang dapay disumbangkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Partisipasi didasari pula oleh adanya kecocokan atau kebutuhan dari partisipasi itu sendiri, kebutuhan mereka, maka mereka berpartisipasi memanfaatkan dan memeliharanya.

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat didalam kehidupan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat akan menunjukan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Besarnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat didalam suatu Negara. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakn publik menunjukan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah akan sesuai dengan kehendak masyarakat.

* + 1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa factor yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subrata dan Atmajaya dalam Sopino (2002:32) adalah sebagi berikut :

1. Adanya interes dan partisipan.
2. Hadiah dari suatu kegiatan.
3. Adanya keuntungan dari kegiatan
4. Motivasi dari luar.

Selanjutnya terdapat pula faktor lain yang dapat mewarnai dan turut berperan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu, pemuka masyarakat/tokoh masyarakat, seperti dikemukakan Mutadi dalam Sopino (2002:33) sebagi berikut : “Dalam pembangunan masyarakat peranan mereka yang tergolong informal leader sangat besar perannya. Mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat desanya. Kadang-kadang suatu program pemerintah dapat gagal karena tidak mengikutsertakan para pemuka masyarakat”.

Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa partisipasi masyarakat pun dipengaruhi oleh adanya seorang yang menjadi pendorong atau motivator dalam suatu kegiatan.

* + 1. **Pentingnya Partisipasi dalam Pembangunan**

Oakley (2003:14), berpendapat bahwa partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat maka pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud,karena masyarakatlah yang lebih tau kebutuhan dan acara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Adi & Laksmono (2001:174) dalam teknis M. Arifin (2007:37) partisipasi masyarakat menjadi lebih penting dalam setiap perencanaan, program dan kegiatan sosial karena :

1. Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa imformasi ini, maka program tidak akan berhasil.
2. Masyarakat akan lebih antusias terhadap program/kebijakan pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan persiapan, sehingga mereka akan menganggap bahwa program atau kebijakan tersebut adlah milik mereka. Hal ini perlu untuk menjamin program pembangunan diterima oleh masyarakat, kususnya dalm program yang bertujuan untuk merubah masyarakat dalam cara berfikir serta bertindak.
3. Banyak negara yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak demokrasi yang bersifat dasar, dimana setiap masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan.

Menurut Supriatna (2002:212) tanpa partisipasi, pembangunan justru akan menganggu manusia dalam upaya untuk memperoleh martabat dan kemardekaan.pentingnya partisipasi masyarakat juga diungkapkan oleh Kartasasmita (2002:145) diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

Menurut Dr. Lastarie White dalam tulisannya “*introduction to community participation”.* Yang dikutip oleh Sastropoetro (2001:33), mengemukakan sepuluh (10) alasan tentang pentingnya partisipasi dalam setiap kegiatan, yaitu sebagi berikut:

1. Dengan partisipasi, lebih banyak hasil kerja yang tercapai.
2. Dengan partisipasi, pelayanan atau *service* dapay diberikan dengan biaya yang murah.
3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya.
4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggungjawab.
6. Partisipasi menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah diusulkan.
7. Partisipasi menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
8. Partisipasi membebaskan orang dari ketrgantungan kepada keahlian orang lain.
9. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengentahuan yang terdapat didalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.
10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2002:222) ada 4 aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :

1. Terlibatnya dan ikut serta rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menentukan stategi dan arah serta kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan recana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya prumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini pada dasarnya dimaksud untuk memungkinkan individu, kelopok, serta masyarakat memperbaiki keadaan mereka sendiri, karena mereka sendirilah yang tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Disamping itu, mereka juga akan merasa memiliki dan bertanggungjawab tentang apa yang telah mereka hasilkan dan mereka dapatkan.

* + 1. **Pengertian Pembangunan**

Todaro (Hasbiah 2018:21) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Todaro (Hasbiah 2018:23), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lebaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan, Menurut todaro (2000:21) definisi diatas memberikan beberapa implikasi bahwa :

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk menigkatkan *income,* tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan :
3. *Life sustenance :* Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
4. *Self-*Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.
   1. *Freedom From Survitude :* Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar diatas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer (Todaro, 2000:24) yaitu :

1. *Copaty,* hal ini merupakan aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
2. *Equity,* hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. *Empowerment,*hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. *Suistanable,*hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Rostow dalam Arif (2000:29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilakan,tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dala perkembang nya pembangunan melauli tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci tahap ini adalah tahap tinggal landas didorong oleh satu sector atau lebih (Arief 2000:30)

Sondang P. Siagian (2005:25) mendefinisikan pembangunan adalah : “ Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam usaha pembinaan bangsa.”

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.

* + 1. **Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah**

Menurut Blakely ada 6 tahap dalam proses pembanguna ekonomi daerah seperti yang disajikan di tabel 2.2 berikut ini, tahapan yang berurutan tersebut meliputi: (1) pengumpulan dan analisi data; (2) Pemilihan strategi pembangunan daerah; (3) Pemilihan proyek-proyek pembangunan; (4) Pembuatan rencana tindakan; (5) Penentuan rincian proyek; (6) Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karna itu, pembangunan desa tidak mungkin bias dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti dikemukakan oleh Utang Rosidin (2019:193) yaitu :

1. Komprehensif multisektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan system pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerintahan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa diwilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional, regional, daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pembangunan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakan partisipasi, prakras dan swadaya gotong royong masyarakat

serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Paradigma pembangunan saat ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Oleh karna itu, masyarakat mempunyai hak ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.peoses partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti dana, tenaga dan keaktifan waktu serta kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangka menyumbangkan ide bagi kepentingan pembangunan. Sebaiknya, apabila masyarakat tidak memiliki kesempatan karna sibuk dengan kegiatan individu, tenaga dan dana karena kemampuan finansial yang tidak memadai dan tingkat pendidikan yang rendah maka pembangunan yang sudah direncanakan akan sulit direalisasikan.

Keterkaitan variabel dengan sub-variabel dalam penelitian ini sebagaimana yang digambarkan pada bagan sebagi berikut:

Berdasar pendapat tersebut diatas, maka kerangka pemikiran di dalam penelitian ini adalah studi partisipasi masyarakat desa dalam mendukung kelancaran pembangunan kampung Dempar Kecamatan Nyuatan Kabupeten Kutai Barat.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
     1. Geografi dan Topografi Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu dari 10 Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai timur dan Kota Bontang tertanggal 4 Oktober 1999. Secara simbolis diresmikan oleh Mentri dalam Negri R.I. pada 12 Oktober 2009 di Jakarta secara oprasional diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 5 November 1999 di sendawar.

Secara geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 114°44’59,05”-116°07’15,23” Bujur Timur, 00°07’54,50” Lintang Utara dan 01°08’58,18” Lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Kutai Barat Mencapai 20.381,59 Km2 atau kurang lebih 15,79 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Secara administrative.

**Batas-batas wilayah Kabupaten Kutai Barat**

* disebelah utara : Kabupaten Mahakam Hulu
* sebelah Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara
* sebelah selatan : Kabupaten Panajam Paser Utara
* sebelah Barat : provinsi Kalimantan Tengah.

Sebelum pemekaran jumlah kecamatan dikabupaten Kutai Barat sebanyak 21 Kecamatan terdiri dari 236 kampung dari kelurahan. Namun setelah keluarnya undang-undang No. 2 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur Maka 5 Kecamatan yaitu Long Apari, Long Bagun, Laham dan Long Hubung secara resmi menjadi Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga jumlah Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Berkurang menjadi 16 Kecamatan.

* + 1. **Profil Kampung Dempar**
       1. **Sejarah Kampung Dempar**

Kampung Dempar merupakan salah satu Kampung yang berada Kabupaten Kutai Barat kampung Dempar Merupakan Kecamatan Nyuatan itu sendiri nama lain juga di sebut Dempar istilah Nyuatan itu sendiri di ambil dari nama sungai yang melintasi beberapa kampung yang ada di Wilayah Kecamatan Nyuatan Hulu sungai ada kampung Intu Lingau dan Hilir ada Kampung Sentalar. Sekitar 80% pekerjaan masyarakat kampung Dempar adalah bertani lebih tepatnya bersawah, 10 % sebagai petani sayur atau berkebun dan sisanya lagi bekerja sebagai CPNS/TKK. Direktorat Jendral Kependudukan dan pencatatan sipil mencatat jumlah warga di kampung Dempar sebanyak 525 jiwa , jumlah Kepala Keluarga sebanyak 247 KK belum termasuk anak-anak usia di bawah 0-5 tahun. Masyarakat yang mendiami di kampung Dempar mayoritas suku Dayak Benuaq asli,Saat ini kampung Dempar di pimpin oleh Salah seorang Camat dan Kepala Desa asli putra daerah itu sendiri, Camat Bernama Lukas dan Kepala Kampung Bernama Etarkus. Kini kampung Dempar di pimpin oleh kedua putra daerah adapun pembangunan yang mereka garap sebagai berikut : (a) Semenisasi Jalan Kampung (b) Pembangunan Gedung Seni (c) Pembangunan Saluran Air Bersih (d) Pembuatan Bak Sampah di Masing-masing RT (e) Pembangunan Gedung BPU dan lain-lain . berikut disertakan Foto Kantor Kepala Desa Kampung Dempar.



**Gambar 1.1. Foto Kantor Kepala Desa Kampung Dempar**

* 1. **Hasil Penelitian**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrakstruktur fisik adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya.

Oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya dioleh pihak-pihak tertentu saja. Pembangunan yang tidak merata adalah karena adalah suatu pembangunan sudah tak memandang arti pentingnya keterlibatan subyek dalam menyelenggarakan pembangunan itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrakstruktur fisik daerah sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Atau, partisipasi juga haru ada ketika pemerintah daerah membutuhkan sebagian dari hak milik mereka dengan ditukar dengan nilai yang sepadan. Partisipasi bisa muncul melalui kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok adat, ataupun satuan-satuan masyarakat yang lebih kecil lainnya. Adanya dukungan dari mereka merupakan dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengklarifikasikan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, tanpa adanya partisipasi, maka dipastikan suatu daerah tidak akan bisa melaksanakan pembangunan daerah dengan baik, apapun bentuk pembangunan yang akan dikerjakan.

Menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis di samping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksanaan pembangunan, tetapi disamping itu disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program-program yang datang dari pemerintah maupun program-program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu diantaranya sebagai kebijakan pemerintah yang berkenan dengan pelibatan masyarakat dalam proses pemnbangunan nasional adalah Program Pembangunan yang datangnya dari dana alokasi desa (DAD).

* 1. **Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun masyarakat kampung Dempar sangat sedikit yang paham artinya partisipasi tetapi proyek pembangunan yang ada tetap dapat berjalan dengan baik, walaupun menggunakan tenaga dari luar dan beberapa masyarakat yang ada. Oleh karena itu partisipasi di kampung Dempar belum dapat menjadi tolak ukur dalam melaksanankan kegiatan pembangunan selanjutnya namun pemerintah kampung Dempar juga tetap berusaha dalam menyampaikan pentinganya partisipasi masyarakat demi kemajuan kampung agar kedepanya masyarakat kampung Dempar semakin sejahtera Menurut Made Patra (Utang Rosidin 2019:175) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan ini dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Menurut Histiraludin (Handayani 2006:39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohestifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”

Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Pembangunan yang tidak merata adalah karena suatu pembangunan sudah tak memandang arti pentingnya keterlibatan subyek dalam menyelenggarakan pembangunan itu sendiri.

**BAB V**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Kampung Dempar, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembangunan di kampung Dempar berhasil walaupun masyarakat masih enggan untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk partisipasi tenaga.

1. **Partisipasi Pikiran**

Kesimpulan yang dapat di ambil dari partisipasi pikiran adalah pemerintah kampung dempar sudah mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat nya dengan mengadakan pembangunan semenisasi jalan adapun dalam partisipasi pikiran pemerintah mengajak masyarakat nya untuk bergabung dalam Musrenbang (Musyawarah rencana pembangunan) untuk berdiskusi tentang perencanaan pembangunan. Rencana ini mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat karena masyarakat turut serta dalam berpartisipasi pikiran, sehingga masyarakat dan pemerintah menyentujui pembangunan Semenisasi jalan di Kampung Dempar.

1. **Partisipasi tenaga**

dari kelima partisipasi , partisipasi tenagalah yang paling banyak memiliki kekurangan karna partisipasi merupakan partisipasi yang membutuhkan tenaga langsung/orangnya namun yang terjadi dilapangan banyak masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi karena memiliki kesibukan dan berbagai alasan**,** walaupun tidak semua masyarakat memiliki alasan seperti itu.

1. **Partisipasi Keahlian**

Dalam suatu proyek pengadaan fisik keahlian/skill memang sangat dibutuhkan karena akan menentukan fisik pembangunan seperti apa yang akan dicapai. Jadi pemerintah kampung dempar mengambil inisiatif untuk mengambil sebagian pekerja dari luar dan sisanya dari warga masyarakatnya sendiri. Sehingga pekerjaan yang ada menjadi ringan karena setiap pekerja nya mengerjakan pekerjaan sesuai kemampuan/keahliannya masing-masing.

1. **Partisipasi Barang**

Partisipasi barang yang dimaksud dalam bab ini adalah barang berupa material hasil bantuan atau pemberian masyarakat secara sukarela walaupun dana yang digunakan untuk pembangunan semenisasi terbilang sangat cukup namun masyarakat tetap memberikan bantuan nya secara sukarela berupa paku, semen, palu, parang dan sebagainya alat-alat yang berupa untuk menunjang pembangunan yang ada .

1. **Partisipasi Uang**

Jadi dalam partisipasi uang masyarakat tidak memberikan uang tunai secara langsung untuk kebutuhan pembangunan namun masyarakat memberikannya dalam bentuk makanan dan minuman berupa kopi,the,gula,rokok bahkan beberapa dari masyarakat berinisiatif untuk memasak di rumah salah satu warga kemudian makanan nya dibawa ke tempat pembangunan semenisasi untuk sekedar makan bersama dan hal ini sangat di apresiasikan oleh lembaga adat kampung serta tokoh agama dan pemerintah kampung.

1. Dari lima jenis partisipasi yang dikaji, ternyata bentuk partisipasi barang memiliki sumbangan yang sangat signifikan dalam mengerjakan proyek kegiatan pengadaan fisik khususnya pembangunan SEMENISASI JALAN pada tahun 2019, walaupun penggerjaan nya dilaksanakan oleh pihak k3 (pemegang proyek).
2. Kepala Kampung Dempar beserta aparatnya cukup aktif dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakat walaupun tidak terlalu berpengaruh di kehidupan masyarakat, namun kegiatan pengadaan fisik seperti SEMENISASI JALAN terbilang sangat baik dan berjalan sesuai rencana sebagai mana yang diharapakan oleh masyarakat dan kepala Kampung.
   1. **Saran**
3. Diharapkan agar kepala kampung dan aparatnya semakin gigih dalam berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat Kampung Dempar guna mendapatkan proyek-proyek dimasa yang akan datang sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat desannya.
4. Agar Kepala kampung Beserta jajarannya semakin baik menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di masa yang mendatang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program dan proyek yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kepala Desa.
5. Agar kepala kampung dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat kampung Dempar senantiasa bersinergi menjadi teladan bagi masyarakat dalam memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan yang dicapai di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan kemudian agar partisipasi masyarakat juga dapat meningkat.
6. Kepala Kampung Dempar agar mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di Kampung Dempar Kecamatan Nyuatan dalam bentuk tenaga selain untuk mempercepat pembangunan juga menjalin tali persaudaraan diantara warga desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abe, Alexander,2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Produk Edukasi,Solo.

Arikunto, Lincoln. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta:Rineka Cipta.

Davis, Keith,2019. *Sistem Pemberdayaan Desa dalam Pemerintah Desa*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

D Astuti, S Irene 2009. *“Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan”.* Penerbit Yogyakarta:UNY.

Hasbiah. 2018. “*Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Di desa Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur*’’. Fisipol Untag 1945 Samarinda.

Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama). Surakarta:Kompip Solo

Kuncoro, Mudarjad, 2000, *Ekonomi Pembangunan,Teori Masalah dan Kebijakan,* unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudarjad, 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Jakarta* : Erlanga

Kuncoro,Mudrajad.2004.*Otonomi & Pembangunan Daerah*: Erlangga.

Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,* Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.

Mubiyarto, 2000, *Pembangunan Pedesaan,* P3PK UGM, Yogyakarta.

Michael, Todaro, 2000, *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga*, Erlangga, Jakarta.

Ndraha, Talidzuhu. 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. PT. Asdi Mahasatya.

Rosidin, Utang,2019, *Sistem Pemberdayaan Desa dalam Pemerintah Desa*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

Siagian, Sondang. P (2005). *Administrasi pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Askaer

Sugiono, 2004. *Metode Penelitian. Bandung* : Alfabeta

Tjokroamindjojo, Bintaro, 1995, *Manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi 2: Edisi 5*. Jakarta: PT. Bumi Askara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

**Sumber Lain :**

Ade Cahyat. 2005. Profil Kampung-kampung Di kutai Barat, <https://kutaibaratkab.go.id> (diakses 8 Januari).

UU No 1 Tahun 2013 Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Kutai Barat (SPPN)

<http://nyuatankubar.blogspot.com/2014/10/kapan-menjadi-kecamatan.html?m=1>

hhtps://id.m.wikipedia.org